

Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria di Kota Kediri

Akmal Yuda Tama, Ertien Rining Nawangsari
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
*akmalyudat@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses urban public transportation in Indonesia, public transportation is an important factor as a basis for implementing sustainable urban development. This research focuses on a policy in the form of a program which is the result of a breakthrough from the Kediri City Government through the Kediri City Transportation Department regarding urban public transportation, namely the Kediri City Satria Bus Program to increase accessibility and mobilization of urban communities. This research is aimed at finding out the implementation of public transportation policies through the Kediri City Satria Bus Program. This research uses the Policy Implementation analysis model by David C. Korten using three research aspects, namely 1) the type of program which consists of clear objectives, the existence of policies taken to achieve the objectives, there is a budget for implementing the program, there is a strategy for implementation. 2) the implementing organization which consists of cognition or understanding of the policy implementer, the direction of the program implementer's response to implementation. 3) recipients of policies consisting of program accuracy, implementation, target and process. The research method used in this research is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the implementation of the Kediri City Satria Bus Program has been running and has been successful in accordance with the wishes of the Kediri City community, however there are several shortcomings felt by the city community as program users.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Satria Bus Program

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang transportasi publik perkotaan di Indonesia, transportasi publik menjadi salah satu faktor penting sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada sebuah kebijakan berupa sebuah program yang merupakan hasil terobosan dari Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan Kota Kediri tentang transportasi publik perkotaan yaitu Program Bus Satria Kota Kediri guna meningkatkan kembali aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat perkotaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan model analisis Implementasi Kebijakan oleh David C. Korten menggunakan tiga aspek penelitian yaitu 1) kebijakan yang terdiri dari tujuan yang jelas, adanya kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan, ada anggaran melaksanakan program, adanya strategi dalam pelaksanaan. 2) organisasi pelaksana yang terdiri dari kognisi atau pemahaman terhadap pelaksana kebijakan, arah respons pelaksana program terhadap implementasi. 3) penerima kebijakan yang terdiri dari ketepatan program, tepat pelaksanaannya, tepat sasaran, serta tepat proses. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan

menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bus Satria Kota Kediri telah berjalan dan berhasil sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Kediri, namun terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat kota selaku pengguna program.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Bus Satria

PENDAHULUAN

Menurut Siyoto & Supriyanto (2015:47), Pengertian Kebijakan yaitu kebijakan adalah kata benda yang dibentuk dari kata bijak dengan mendapat kata awalan ke- dan akhiran -an yang berarti keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), kecakapan (*capability*), dan kemampuan memahami sesuatu (*insight*). Istilah kebijakan perlu dibedakan dari kebijaksanaan yang terbentuk dari sebuah kata bijaksana dengan mendapat awalan kata ke- dan akhiran -an. Kebijakan merupakan karakter atau sifat yang tetap melekat pada subjeknya, sedangkan kebijaksanaan adalah sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku dan perbuatannya

Kebijakan merupakan kata yang mencakup ruang lingkup tentang pemerintahan, pemerintah, kecerdikan atau kebijaksanaan politik, perilaku bijaksana, atau bijaksana atau sebuah prinsip dan atau manajemen, rencana, atau penyebab terjadinya organisasi pemerintah atau tindakan individu (Kuncoro,2012:170). Lalu Kuncoro memberikan padangan arti dari kebijakan yang digunakan sehari-hari, yaitu konsep dan asas yang menjadi sebuah pedoman dasar dan garis haluan dalam implementasi sebuah pekerjaan dan kepemimpinan dalam organisasi bisa pemerintahan maupun swasta, pernyataan dari cita-cita, prinsip, tujuan dan maksud untuk manajemen sebagai sebuah cara mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah aktivitas yang memiliki ciri khas tersendiri, dalam arti kata bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki kebijakan jenis lain (Wahab, 2012:20-24)

Menurut Makmur dan Thahier (2016:10), Kebijakan muncul dari kata dasar bijak yang berarti sekelompok orang atau seseorang yang memiliki potensi pemikiran dan perasaan untuk memahami sebuah kondisi permasalahan dari seseorang, kelompok orang atau lingkungan sekitar dalam kurun waktu atau situasi tertentu. Sedangkan dari Dunn (1981)Kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai; (ii) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih; (iii) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah; (iv) program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan (v) keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu; (vi) teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y; (vii) proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang.

Terdapat beberapa langkah dalam membuat formulasi kebijakan publik, yaitu : 1) Tahap pengkajian persoalan, 2) Tahap Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, 3) Penyusunan Model Kebijakan, 4) Perumusan Alternatif Kebijakan, 5) Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan, 6) Penilaian Alternatif Kebijakan, serta 7) Perumusan Rekomendasi Kebijakan (Amtai Alasan, 2021)

Terdapat beberapa variabel-variabel kerangka kerja dalam kebijakan publik yang dinamakan kerangka kebijakan publik. Kerangka tersebut dapat ditentukan berdasarkan beberapa variabel antara lain berikut: a) Tujuan yang ingin dicapai, Tujuan ini meliputi macam-macam kompleksitas tujuan yang ingin dicapai, b) Penentuan nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah kebijakan, c) Sumber daya yang diperlukan dan dilibatkan dalam kebijakan. d) Kemampuan dari kualitas aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. e) Pengaruh lingkungan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. f) Strategi implementasi yang digunakan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan

kebijakan publik memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki kebijakan jenis lain (Wahab, 2012:20-24). Melihat definisi di atas berarti kebijakan publik memiliki khas atau ciri-ciri tersendiri, yaitu : a) Kebijakan publik adalah aktivitas yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan tertentu, sehingga segala bentuk kebijakan dalam segala bidang merupakan aktivitas atau tindakan yang sudah direncanakan. b) Kebijakan publik adalah aktivitas yang memiliki sistem atau pola dan saling berkaitan satu sama lain dengan arah dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah. c) Kebijakan publik yaitu kegiatan nyata apa yang dilakukan pemerintah dalam suatu bidang tertentu, bukan hanya sebuah keinginan. d) Kebijakan publik yang dibuat dapat berbentuk positif maupun negatif.

William Dunn (1998:25) dalam Dody Setiawan (2017:37-39) mengemukakan tahapan kebijakan publik yaitu : a) Penyusunan Agenda. Dalam penyusunan agenda, penafsiran atau analisa terhadap fenomena publik sangat dibutuhkan, sehingga pembahasan agenda yang diajukan benar-benar pantas serta layak untuk diutamakan dan dipertarungkan. b) Formulasi Kebijakan, Permasalahan yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan publik, kemudian akan dibahas oleh para formulator kebijakan publik. Permasalahan tersebut akan dipaparkan lalu dicari akar permasalahan tersebut, kemudian dilanjutkan pencarian solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. c) Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Tahap adopsi atau legitimasi sebuah kebijakan dimaksudkan untuk memberi sebuah otoritas terkait produk kebijakan publik oleh para formulator. d) Implementasi Kebijakan, Kebijakan publik yang telah dihasilkan dari para formulator kemudian dijalankan oleh bagian unit administrasi yang menggerakkan segala sumber daya yang dimiliki dan juga dibutuhkan yaitu sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. e) Penilaian Kebijakan, Sedangkan menurut Winarno (2008:225) Tahapan terakhir adalah melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah

dilaksanakan. Penilaian ini mencakup beberapa hal yaitu implementasi, substansi, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik tersebut.

Pengertian implementasi menurut Suparno (2017:15) merupakan bagian dari sebuah proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda *setting*, *formulation*, *adoption* dan tahapan sesudahnya *assesement*. Maksud dari pengertian implementasi kebijakan adalah “kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan” (Charles O Jones, 1991) .

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi” (Solichin Wahab, 1991)

Abdul Wahab (1997) memaparkan fungsi dari implementasi kebijakan adalah untuk membentuk sebuah hubungan yang dapat mencapai tujuan-tujuan atau sasaran diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, hal ini mencakup penciptaan suatu sistem pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan negara, yang biasanya mencakup metode atau cara tertentu yang dirancang dan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sehingga dalam kaitannya dengan sebuah kebijakan publik, disini terdapat sebuah usaha untuk membangun kaitan (*linkage*) dari sebuah tindakan program-program dengan tujuan atau sasaran dari sebuah program yang ingin dicapai.

Permasalahan yang terjadi pada Kota Kediri ini adalah terkait angkutan umum, yang diaman terjadi penurunan jumlah angkutan umum di Kota Kediri disebabkan oleh kurang terawatnya angkutan serta fasilitas yang ditawarkan kepada pengguna layanan, akibatnya terjadi penurunan aksestabilitas masyarakat karena kesulitan mencari angkutan umum. Sehingga masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi yang akhirnya mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah pemilik atau penggunaan kendaraan pribadi wilayah Kota Kediri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri Tahun 2023 diketahui bahwa kebutuhan kendaraan di Kota Kediri mengalami cukup banyak peningkatan walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 5,8% dari tahun 2021 yang sudah mengalami penurunan sebanyak 6% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Data tersebut membuktikan bahwa semakin tahun jumlah kendaraan di Kota Kediri mengalami kenaikan jumlah selama periode 2019 hingga 2022, Tetapi justru terjadi penurunan pada jumlah angkutan massal

Tahun 2016 Pemerintah Kota Kediri telah membuat sebuah kebijakan berupa program yaitu Bus Sekolah Gratis ditujukan khusus untuk pelajar sekolah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan, kecelakaan lalu lintas pada pelajar, serta untuk menambah trayek yang tidak dilewati oleh angkot sekolah gratis. Dalam operasionalnya Bus Sekolah Gratis ini memiliki tiga trayek yang ditujukan untuk melayani trayek yang tidak dilewati angkot gratis bagi pelajar. Pada Bulan September Tahun 2023 Program Bus Sekolah Gratis dari Pemerintah Kota Kediri mengalami perkembangan dan berganti nama menjadi Program Bus Satria Kota Kediri yang telah diresmikan oleh Wali Kota Kediri pada saat itu adalah Abdullah Abu Bakar. Tujuan dari pengembangan Program Bus Sekolah Gratis menjadi Program Bus Satria sudah tercantum dalam Pasal 3 pada Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2016 yaitu tujuan yang dicapai dalam penyelenggaraan operasionalisasi bus *rapid* transit adalah meningkatkan pelayanan dalam menunjang aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Kota Kediri. Seharusnya dengan adanya Program Bus Satria dapat membantu mobilisasi masyarakat dan menciptakan lalu lintas agar dapat lancar. Namun, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Program Bus Satria ternyata masih memiliki kekurangan dalam implementasinya.

Penelitian ini lebih menarik karena merupakan penelitian yang pertama di Kota Kediri dengan fokus pembahasan pada Program Bus Satria Kota Kediri dengan sasaran masyarakat yang lebih luas tanpa ada batas. Lokus penelitian ini adalah pemerintah yang berfokus menangani bidang perhubungan yaitu Dinas Perhubungan Kota Kediri. Penentuan lokasi penelitian dilakukan atas pertimbangan permasalahan, teori substantif serta fokus penelitian. Selain itu, ketersediaan data juga menjadi faktor penting dalam memilih lokasi. Sehingga lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan pertimbangan yang mendalam antara relevansi lokasi dengan tujuan penelitian. Rumusan permasalahan ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria Di Kota Kediri.

Sebelumnya telah ada penelitian yang sama dengan lokus yang sama, namun perbedaannya adalah materi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia (2017) membahas tentang Program Bus Sekolah Gratis. Hal tersebut berbeda karena penelitian sebelumnya hanya bertarget pada anak-anak sekolah bukan kepada masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang dapat digambarkan dengan ilmiah dan sistematis terkait kebijakan transportasi publik melalui Program Bus Satria Kota Kediri.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik dengan menerapkan model *top-down*. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan

Program Bus Satria dalam mewujudkan transportasi publik di kota Kediri dengan melihat dari variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program menurut David C.Korten. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teori dari David C. Korten yang terdiri dari beberapa macam variabel-variabel menurut Korten, suatu program atau kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika terdapat tiga macam unsur implementasi program, yaitu:

1. Kebijakan

- a. Adanya tujuan yang akan dicapai dengan jelas
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan
- c. Adanya anggaran untuk melaksanakan program
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan

2. Organisasi Pelaksana

- a. Kognisi atau pemahaman dan pendalaman terhadap maksud dan tujuan program yang dibuat.
- b. Arah respons dari pelaksana program terhadap implementasi yaitu apakah menerima atau justru menolak

3. Penerima Kebijakan

- a. Tepat program yaitu sejauh mana program yang telah ada dalam memuat dan memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Tepat pelaksanaannya yaitu implementator yang sesuai dengan program yang akan dijalankan.
- c. Tepat sasaran yaitu target sesuai dengan yang direncanakan dalam program, dengan kondisi siap dan mendukung implementasi program yang akan dijalankan.
- d. Tepat proses yaitu antara organisasi pelaksana dan masyarakat yang saling memahami, organisasi pelaksana menerima dan melaksanakan program sedangkan masyarakat menerima, memahami dan melaksanakan program.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu melalui proses wawancara. Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana mempertimbangkan yang menjadi informan atau narasumber adalah seseorang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi wawancara secara terstruktur yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*.

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (2014) yang mana analisis data kualitatif dilakukan

dengan beberapa tahap, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara melalui wawancara dan sejumlah data pendukung terkait dengan fokus penelitian, maka perlu adanya analisis data temuan dalam lapangan guna mendapatkan kesimpulan akhir. Sehingga pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil analisa data sesuai dengan temuan di lapangan terkait Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria di Kota Kediri.

David C. Korten dalam Arfi Rayyan (2020) mengungkapkan bahwa sebuah program akan dapat berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari tiga elemen implementasi program, diantaranya yaitu program, kelompok sasaran program dan organisasi pelaksana program. Lebih lanjut penjelasan ini dibuat menjadi 3 indikator implementasi program, yaitu (1) Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran Program, (2) Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana Program, dan (3) Kesesuaian antara Kelompok Sasaran Program dengan Organisasi Pelaksana Program.

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bus Satria yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri menggambarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan

Menurut Korten dalam Abdurrahman, Eddy Suriyani (2022) harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Jika tidak terdapat sebuah kesesuaian dengan kebutuhan yang ada saat itu maka program tidak ada manfaatnya ketika dilaksanakan pada penerima program. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek di antaranya:

a. Adanya tujuan yang akan dicapai dengan jelas

Dinas Perhubungan Kota Kediri menegaskan bahwa terkait tujuan dari adanya Program Bus Satria ini adalah untuk menunjang kembali aktivitas masyarakat dengan mengaktifkan kembali transportasi perkotaan guna membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Kota Kediri dalam kegiatan sehari harinya. Dari hal tersebut disimpulkan bahwa pada indikator ini yaitu untuk tujuan dari adanya program yaitu melalui Bus Satria Kota Kediri sudah terlihat jelas dan lugas untuk menjawab tantangan permasalahan akibat matinya transportasi publik perkotaan dan masyarakat telah merasa terbantu dengan adanya Program Bus Satria Kota Kediri ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat tujuan yang jelas sesuai dengan indikator adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai dengan jelas sesuai teori David C. Korten

b. Adanya kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan

Telah ada kebijakan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Program Bus Satria yang. Bentuk dari kebijakan tersebut adalah sebuah undang-undang daerah yaitu Peraturan Wali Kota Kediri No 25 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit. Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa telah terdapat sebuah kebijakan guna mencapai tujuan dari sebuah program yaitu Peraturan Wali Kota Kediri Ni 25 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai, yaitu sebagai salah satu aktor kebijakan formal yang berperan dalam pembuatan undang-undang dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan tersebut dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit dengan menunjuk dinas Perhubungan sebagai pelaksana program

c. Adanya anggaran untuk melaksanakan program

Tabel 1. Anggaran Operasional Program Bus Satria Kota Kediri

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024

	Nama	Jenis Barang	Jumlah Barang	Anggaran Dana	Total Anggaran
1	Pemeliharaan Kendaraan	Bus	5 Unit Bus	Rp. 37.110.000/unit	Rp. 185.550.000
2	Bahan Bakar Minyak	Dexlite	58.444 liter	14.500/liter	Rp. 847.435.200
	Total				Rp. 1.032.987.200

Tabel di atas merupakan jumlah anggaran operasional yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bus Satria Kota Kediri, jumlah anggaran operasional yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bus Satria Kota Kediri, Tahun 2024 total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.032.987.200 yang dibagi 90 menjadi dua jenis yaitu anggaran guna pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 185.550.000 dan anggaran guna kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dengan total 847.435.200. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut pada setiap tahun akan diadakan penyesuaian anggaran sesuai dengan penggunaan, sehingga anggaran yang digunakan tersebut mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah kota. Dengan begitu, pada pelaksanaan Program Bus Satria Kota Kediri ini tidak ada keharusan dalam mengejar target setoran, melainkan penuh menggunakan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kota Kediri dalam pelaksanaannya.

d. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Telah ada beberapa upaya strategi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri terkait pelaksanaan Program Bus Satria. Strategi tersebut adalah sosialisasi secara bertahap melalui kelurahan desa yang ada di Kota Kediri dan melalui poster akun resmi sosial media yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri hingga saat ini. Namun ternyata strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, sehingga beberapa masyarakat kurang mengetahui akibat frekuensi sosialisasi masih dirasa kurang. Karena strategi yang digunakan pada Program Bus Satria yaitu hanya menggunakan media massa *online* yaitu sosial media yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri dan juga kerja sama melakukan penyebaran informasi dengan lingkungan hingga kepala desa yang menyebarkan informasi kepada masing-masing daerahnya melalui media komunikasi *online* dan tidak ada media cetak atau pamflet sehingga banyak masyarakat umum kurang mengetahui program ini terutama para masyarakat yang sudah berumur dan jarang bermain sosial media sebagai alat komunikasi digital.

2. Organisasi Pelaksana

Abdul Wahab (1990:133) menjelaskan peran organisasi atau pelaksana program dalam kaitannya dengan respons cepat, yang dapat digunakan untuk menyaring informasi yang relevan dengan kebutuhan penerima atau kelompok sasaran program. Dengan demikian, akan timbul kesepahaman antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan penerima manfaat program

a. Pemahaman pelaksana

Para pelaksana Program Bus Satria yakni sudah memahami tujuan dan maksud dari program sesuai dengan dasar dan tujuan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2016 dan juga Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 102 Tahun 2021. Namun masyarakat menilai dalam pelaksanaannya dirasa para pelaksana untuk hal ini pengemudi bus memiliki kekurangan. Hal ini terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan bus pada tiap bus stop ataupun halte yang telah disediakan oleh pemerintah. Permasalahan pada ketepatan waktu yang membuat masyarakat merasa terlewat akan kedatangan bus terlebih jika bus terakhir telah berangkat dan tidak ada bus selanjutnya lagi yang datang. Sehingga yang terjadi pada implementasi Program Bus Satria Kota Kediri perlu adanya upaya perbaikan sumber daya guna meningkatkan kembali pengguna layanan transportasi publik Kota Kediri.

b. Respons pelaksana program dengan penerima program

Dinas Perhubungan Kota Kediri telah menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Program Bus Satria Kota Kediri, hal tersebut didukung oleh bukti nyata di lapangan bahwa memang setiap hari bus tersebut selalu berjalan dan terlaksana setiap hari dan adanya pembaharuan pada plang jadwal keberangkatan bus dan halte yang diperbaharui. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Bus Satria ini telah dirasa membawa kebaruan terhadap transportasi publik di kota Kediri sehingga masyarakat senang akan kehadiran program ini, maka dari itu menjadi sebuah penanda bahwa masyarakat merespons baik terkait Program Bus Satria tersebut. Dengan demikian, maka respons para pelaksana mencerminkan sikap positif terhadap pelaksanaan program guna membangkitkan kembali sistem transportasi publik perkotaan.

3. Penerima Kebijakan

Penerima kebijakan disini adalah para kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan program yang akan dilakukan. Adapun indikator keberhasilan dari penerima keberhasilan adalah sebagai berikut :

a. Tepat Program

permasalahan transportasi publik di kota Kediri yang berawal dari matinya angkutan umum menjadi penyebab adanya Program Bus Satria ini. namun tentunya dinas perhubungan terus berupaya mengupayakan yang terbaik dengan adanya evaluasi-evaluasi terkait transportasi publik melalui bus satria kota Kediri. Lalu dapat dilihat juga bahwa dengan adanya Program Bus Satria membuat masyarakat menjadi terbantu terkait akses transportasi publik apalagi program ini dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat tanpa harus membayar. Hal tersebut menunjukkan masyarakat merasa terbantu sehingga dapat dikatakan bahwa Program Bus Satria Kota Kediri ini memang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kota Kediri terkait transportasi publik perkotaan.

b. Tepat pelaksanaannya

pelaksanaan Program Bus Satria telah dilaksanakan tepat, namun dalam pelaksanaannya tidak semulus yang sesuai jadwal. Menurut masyarakat terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan yaitu ketidaktepatan dalam jam keberangkatan pada halte yang telah disediakan, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas transportasi publik tersebut. Melihat hasil yang ditemukan oleh peneliti terdapat kekurangan pada segi Sumber Daya Manusia dan koordinasi antar anggotanya khususnya pada *driver* bus yang dirasa masyarakat kurang sesuai terkait jam keberangkatan dan kedatangan bus yang telah tertera pada plang masing-masing halte.

c. Tepat sasaran

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Penumpang Harian

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kediri 2024

	Bulan	Rata-rata Penumpang Harian
1	Januari	25,7
2	Februari	26,3
3	Maret	14,5
4	April	4,9
5	Mei	22,2

Program Bus Satria ini telah tepat sasaran dalam memberikan pelayanan publik berupa transportasi umum. Karena hal tersebut telah terbukti membantu masyarakat yang menggunakan transportasi umum dalam kesehariannya setelah kehilangan moda transportasi umum berupa angkutan umum atau lyn kota setelah pandemi covid-19. Selain itu juga menurut masyarakat hal ini dapat membantu mereka terutama dari segi akomodasi dalam mobilitas dan aksesibilitas sehari-hari. Dengan demikian sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah sudah tepat karena memang menasar kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali, namun melihat rata-rata harian jumlah penumpang yang naik pada setiap bus tahun 2024 dengan rentang waktu bulan Januari 2024 hingga Mei 2024 jumlah penumpang mengalami penurunan pada bulan Maret-April namun kembali naik pada bulan Mei.

d. Tepat Proses

sudah menunjukkan adanya pemahaman diantara masyarakat dan organisasi pelaksana. Hal itu dibuktikan bahwa pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Kediri selalu memahami serta menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan Program Bus Satria Kota Kediri dan ditunjukkan juga bahwa masyarakat sudah ikut andil dalam pelaksanaan program dengan menggunakan fasilitas transportasi publik pada sehari-harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Kediri selalu memahami serta menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan Program Bus Satria Kota Kediri dan ditunjukkan juga bahwa masyarakat sudah ikut andil dalam pelaksanaan program dengan menggunakan fasilitas transportasi publik pada sehari-harinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan

Pada indikator kebijakan dari Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria ini telah memenuhi indikator yang telah diimplementasikan. Melihat bahwa Program Bus Satria ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Kediri dalam segi meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas layanan transportasi umum perkotaan menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga dari kebijakan program tersebut memberikan dampak bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum perkotaan sebagai moda kendaraan sehari-hari. Daripada hanya program yang dikembangkan, Dinas perhubungan juga telah memperbaharui serta mengembangkan penunjang lain yang mendukung kesiapan program seperti halte, papan bus stop, papan jadwal keberangkatan guna mempermudah masyarakat untuk menyesuaikan diri terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan bus.

c. Pemahaman Pelaksana

Pemahaman pelaksana terkait Implementasi Program Bus Satria Kota Kediri ini sudah sesuai dengan bagaimana para pelaksana melaksanakan tugasnya seharusnya. Hal ini dilihat dari segi pemahaman terkait tanggung jawab dan tugas pokok fungsi sebagai pelaksana program. Namun ketika pelaksanaan program terdapat kendala yang ditemukan sehingga pelaksanaan program kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kendala tersebut adalah ketidaktepatan waktu oleh pelaksana kebijakan program dalam pelaksanaannya, sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang dimana dirasa masyarakat menjadi sebuah kekurangan pada program ini. Dalam pelaksanaan program tersebut mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat. Selama 2024 terbukti bahwa selalu terdapat penumpang yang menaiki bus tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa pelaksana program menerima respons dengan baik oleh masyarakat sebagai penerima Program Bus Satria Kota Kediri.

d. Penerima Kebijakan

Pada indikator penerima kebijakan dari Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria di Kota Kediri ini telah sesuai dengan yang diimplementasikan. Dari segi transportasi umum perkotaan yang sebelumnya sudah mati sehingga masyarakat kebingungan hingga muncul kembali alternatif transportasi umum perkotaan melalui program Bus Satria Kota Kediri dirasa sudah sesuai untuk mengatasi permasalahan matinya transportasi umum perkotaan. Program ini sudah tepat untuk

masyarakat dalam mewujudkan transportasi umum perkotaan yang baik sekaligus sebagai pemecah permasalahan terkait transportasi umum perkotaan di Kota Kediri setelah hampir 4 tahun mengalami kematian. Berdasarkan kesimpulan dari ketiga indikator di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Bus Satria di Kota Kediri yang dilaksanakan bidang perhubungan yakni Dinas Perhubungan Kota Kediri telah berhasil dan berjalan dengan cukup baik sesuai dengan penjelasan dari teori implementasi kebijakan David C. Korten dalam A.G Subarsono (2005) yang meliputi 3 (tiga) Indikator diantaranya adalah adanya kebijakan, pemahaman pelaksana, dan penerima program.

Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut terlihat hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini sudah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan terkait Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Melalui Program Bus Satria di Kota Kediri, yaitu pertama, terkait armada yang dimiliki dan digunakan dalam pelaksanaan Bus Satria perlu adanya penambahan jumlah armada bus, sehingga apabila hal tersebut terpenuhi maka yang terjadi adalah terdapat simpangan antar rute dan rute yang dilalui dalam kota Kediri menjadi lebih merata dan terkoneksi. Kedua, Perlu adanya kerja sama dengan sektor publik dengan sektor *private* secara berkala guna membangun kembali transportasi publik perkotaan agar hidup kembali, hal ini dapat dimulai dari menghidupkan kembali trayek lyn atau memperbaharui kembali armada lyn dengan yang baru dan sesuai kebutuhan. Ketiga. Pelatihan pemahaman lebih lanjut terhadap pegawai pelaksana oleh pelaksana yakni Dinas Perhubungan terkait kapasitas dan kapabilitas para sopir atau pengemudi bus satria khususnya terkait waktu pelaksanaan, sehingga keinginan masyarakat terkait permasalahan jam operasional tidak mengalami keluhan-keluhan kembali dan tentunya agar ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan bus sesuai jadwal. Keempat, Mengaktifkan kembali aplikasi Traker yang telah ada dan dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri yang kemudian dapat di tambahkan pelacak GPS terkait atau penambahan papan informasi kedatangan bus seperti di halte bus Transjakarta keberadaan bus sehingga keberadaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Y. A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, A. A., Ahid, N., Fawzi, T., Muhtadin, M. A., Kediri, I., & Satu Tulungagung, U. (n.d.). Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Pembelajaran. *TSAQOF A H Jurnal Penelitian Guru Indonesia*. Retrieved from <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 12 (2024) 5558 – 5573 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i12.4686

- Abdurahman, & Suriyano, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Jombang. *Journal Name*, 5(1).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Administrasi Negara, J., Sani, R., & Wahid, A. (n.d.). Kebijakan Transportasi Publik dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat: Studi Kasus Penggunaan Transjogja. *Sawala*. <https://doi.org/10.30656/sawala>
- Afli, O. F. (2024). Pendekatan Rata-Rata Aritmatika dalam Menentukan Sasaran Tujuan yang Proporsional pada Program De Novo Multitujuan. *Journal Name*, 3(6).
- Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. *SAKOLA-Journal of Sains Cooperative Learning and Law*.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Kab. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Aminah, S. (n.d.). Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Journal Name*.
- Andani, A. T. V., & Setyowati, E. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *JIAP*, 5(3).
- Aplikasi, J., Publik, K., Kebijakan, I., Bus, S., Transportasi, S., Alifianka, P., Permata, P., Tukiman, P., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2023). Public Policy. *Public Policy Journal*, 4(2). Retrieved from <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Astutik, A. P., & Farista, R. (n.d.). Respon Kebijakan Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam. *Journal Name*.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Besar, G. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Christianingsih, E., Casa No, J., & Sulaiman, L. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. *Journal Name*.
- Deby, L., Putri, M., & Mutiarin, D. (n.d.). Efektivitas Inovasi Kebijakan Publik: Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal Name*.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 12 (2024) 5558 – 5573 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i12.4686

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Hidaya, A. S., & Nafisah, S. (2023). Analisis Kesesuaian Implementasi Program Gerakan Literasi di Sekolah Berdasarkan Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Blitar). *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 17(2), 164. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2022.172.164-198>
- Kristyowati, R. (2024). Evaluasi Inovasi Pelayanan Program Suroboyo Bus dalam Mewujudkan Transportasi Publik Berkelanjutan di Kota Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(05).
- Kurniawan, A. (2019). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Transjakarta (Busway) dalam Rangka Mengurangi Kemacetan. Retrieved from <http://www.bps.go.id/>
- Larasati, D., Kismartini, K., & Suwitri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan). *Journal Name*.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan COVID-19 di Desa Kuma Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Name*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, N., & Maldina, E. Y. (2017). Strategi Pemasaran Islami. *Journal Name*, 3. Retrieved from <http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html>
- Mutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Pemerintah Kota Kediri. (2016). Peraturan Walikota Kediri No 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit.
- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Transportasi Darat Bali, P., Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 2(1), 19–28.
- Penulis, T., Hasbi, I., Fuadi, A., Nadeak, B., Arifudin, O., Lestari, A. S., Utomo, W. T., Rianita, N. M., Fatmasari, R., & Pasaribu, E. (2021). *Administrasi Pendidikan: Tinjauan Konsep dan Praktik*. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Purwanto, N. A. (2020). *Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik di Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Intishar Publishing.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 12 (2024) 5558 – 5573 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i12.4686

- Putri, S. A., & Nawangsari, R. (2023a). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2). Retrieved from <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Rayyan, M. A. (2020). Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Global Review of Accounting and Finance*, 1(1). Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>
- Rosyid, A. (n.d.). Integrasi Transportasi Publik dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/357619026>
- Sau'ud Aslur, S., & Tukiman. (2023). Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA). *Journal Name*, 14(1).
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementation of Integrated Stunting Prevention Policy. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2). Retrieved from <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Simanjuntak, R., Simanjuntak, E., & Siahaan, Y. (n.d.). Analisa Kebijakan Angkutan Umum Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam melalui Social Impact Assessment. *Journal Name*, 1(1).
- Soejachmoen, M. H. (2009). *Transportasi Kota dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan*. Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Konrad-Adenauer Stiftung (KAS), Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), dan Program Lingkungan Hidup Indonesia-Jerman (ProLH).
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- View, P. M., Suwarno, Y., & Lan, S. (n.d.). Brexit dan Pembelajaran Kebijakan Publik. Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2016_en
- Widowati, N. (2022). Analisis Aktor Implementasi Kebijakan BRT (Bus Rapid Transit) Semarang dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Semarang. *Journal Name*.
- Wijaya, S. S., Setyoko, P. I., & Rosyadi, S. (2018). Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik di Purwokerto. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 17–26. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.744>
- Winata, W. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi di Kota Bandung. *Journal Name*, 2(1).